



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2022



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2022

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2022

ISBN

Nomor Publikasi

Katalog

Ukuran Buku

18.2 cm x 25.7 cm

Jumlah Halaman

xii + 40 halaman

Naskah

Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu

Gambar Kulit

Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu

Diterbitkan oleh

©Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu

Dicetak oleh

GMedia

Sumber Ilustrasi

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Sukarwanto, SST

Penyunting

Mujahid Rasyid, S.Si, M.I.Kom

Penulis

Nurhasanah Dwi Putri, S.Tr.Stat

Pengolah Data

Nurhasanah Dwi Putri, S.Tr.Stat

Pembuat Infografis

Nurhasanah Dwi Putri, S.Tr.Stat

<https://inhukab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas kehendak-Nya Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2022 dapat diselesaikan. Statistik Politik dan Keamanan merupakan publikasi dari Fungsi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik. Publikasi ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi politik dan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2022, mengulas mengenai keadaan politik pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mulai dari jumlah anggota DPRD, peraturan daerah yang dihasilkan DPRD, hingga jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian juga membahas mengenai keamanan Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari kantor dan personil polisi hingga jumlah kejadian kejahatan menurut kelompok kejahatan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020-2021.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Rengat, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Indragiri Hulu

Sukarwanto, SST

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. METODOLOGI	9
2.1 Sumber Data.....	9
2.2 Pengumpulan Data.....	9
2.3 Konsep Definisi.....	10
2.3.1 Konsep dalam Statistik Politik.....	10
2.3.2 Konsep dalam Statistik Keamanan.....	10
2.4 Penjelasan Teknis.....	11

BAB III. POLITIK.....	15
3.1 Kondisi Penduduk.....	15
3.2 Lembaga Demokrasi.....	16
3.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	17
3.3.2 Organisasi Masyarakat/LSM.....	20
BAB IV. KEAMANAN.....	25
4.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	25
4.2 Indikator Utama Kejahatan.....	27
4.3 Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Indragiri Hulu.....	29
4.4 Korban Kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	31
BAB V. PENUTUP.....	35
5.1 Kesimpulan.....	35
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Hal
	.
Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021.....	16
Gambar 2. Persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Menurut Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	19
Gambar 4. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021.....	20
Gambar 5. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021.....	21
Gambar 6. Jumlah Personel Polisi Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.....	25
Gambar 7. Rasio Penduduk per Polisis di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021.....	26
Gambar 8. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) dan Kejahatan Diselesaikan (Crime Cleared) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021.....	28
Gambar 9. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1. Jumlah Kejadian Kejahatan (Lapor dan Selesai) Menurut Kelompok Kejahatan Tahun 2020-2021.....	37
Lmapiran 2. Jumlah Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Kejahatan Tahun 2020-2021.....	39

<https://inhukab.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Politik dan kemanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling memengaruhi. Ada kalanya situasi politik di suatu wilayah akan memengaruhi keamanan di wilayah tersebut, atau sebaliknya situasi keamanan di suatu wilayah akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan-kebijakan politik di wilayah tersebut.

Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain itu, hal ini juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman bagi warganya.

Di sisi lain, seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Dimulainya era reformasi di Indonesia, memberi peluang pada penduduk Indonesia untuk lebih mudah dalam hal kebebasan berkumpul dan berpendapat. Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berpengaruh, baik langsung maupun tidak terhadap tingkat stabilitas keamanan dalam masyarakat.

Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Terkait hal tersebut, maka monitoring situasi politik dan keamanan di daerah menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu berupaya melakukan penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2022. Diharapkan, publikasi ini mampu menjadi salah satu sumber informasi mengenai gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data statistik di bidang politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai situasi politik dan keamanan terkini di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu,

tersedianya data statistik mengenai politik dan keamanan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3 RUANG LINGKUP

Publikasi ini menyajikan data tentang gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari publikasi ini terdiri dari lima bab meliputi pendahuluan, metodologi, politik, keamanan, dan penutup.

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.

Bab II Metodologi

Berisi tentang sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta konsep definisi yang digunakan.

Bab III Politik

Menjelaskan tentang kondisi politik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab IV Keamanan

Menjelaskan tentang kondisi keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang dibuat berdasarkan pembahasan pada politik dan keamanan.

2

METODOLOGI

INTERNATIONAL DAY OF

DEMOCRACY



BAB II

METODOLOGI

2.1 SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2022 ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu. Rincian data dan sumber publikasi data yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi Kabupaten Indragiri Hulu dalam angka 2022 untuk mendapatkan data jumlah proyeksi penduduk tahun 2021.
2. Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022 oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendapatkan data jumlah anggota DPRD menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2021, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD tahun 2021, jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas)/lembaga swadaya masyarakat (LSM) tahun 2021, jumlah kantor polisi, jumlah personil polisi, jumlah kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021. Narasumber Survei Statistik Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi yang berkaitan dengan politik dan keamanan, antara lain Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Indragiri Hulu.

2.2 PENGUMPULAN DATA

Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022 oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu menjadi salah satu sumber data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2022. Data pada survei Statistik Politik dan Keamanan 2022 ini dikumpulkan

melalui kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait. Selanjutnya data yang masuk ke BPS Kabupaten Indragiri Hulu diolah menjadi tabel dan grafik yang tersaji dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2022.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

2.3.1 Konsep dalam Statistik Politik

- a. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.
- c. Organisasi Masyarakat/LSM adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya.

2.3.2 Konsep dalam Statistik Keamanan

- a. Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap

tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

- c. Peristiwa yang diselesaikan oleh Kepolisian adalah:
- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau lebih diserahkan kepada jaksa
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa
- d. Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- e. Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

2.4. PENJELASAN TEKNIS

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini diantaranya:

- a. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)

$$crime\ rate = \frac{Jumlah\ kejahatan\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ Penduduk} \times 100.000$$

Interpretasi: Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah

b. Persentase penyelesaian peristiwa kejahatan (*crime clearance*)

$$\text{crime clearance} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100.000$$

Interpretasi: Semakin tinggi berarti kinerja polisi semakin baik dalam menangani kasus

3

POLITIK



BAB III

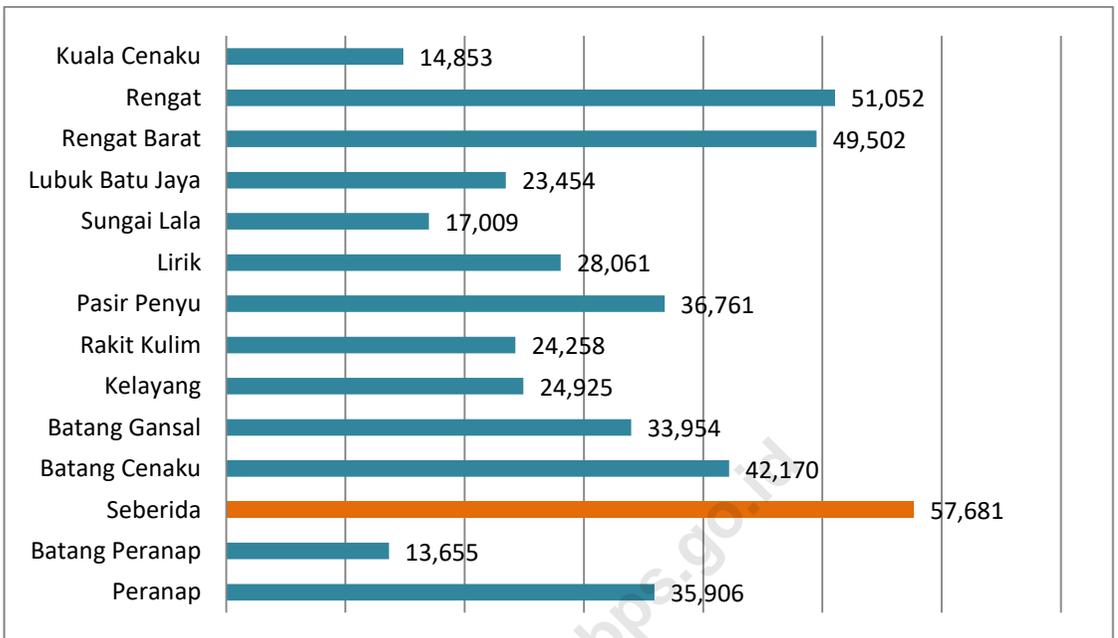
POLITIK

3.1 KONDISI PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi berniat untuk menetap. Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tersebar ke seluruh wilayah Indragiri Hulu yang memiliki luas mencapai 8,198.26 km², terbagi ke dalam 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 178 desa dan 16 kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu dapat diketahui melalui kegiatan Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh BPS. Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus penduduk yang terakhir dilakukan.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 adalah sebanyak 453,241 jiwa. Angka ini didapatkan dari Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021 sebesar 2.62 persen per tahun. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kecamatan Seberida sebanyak 57,681 jiwa, sedangkan Kecamatan Batang Peranap dengan jumlah penduduk sebanyak 13,655 jiwa menjadi kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam kegiatan politik, jumlah penduduk merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara. Dengan mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya untuk memenangkan suatu pemilu karena rakyat adalah pemegang kedaulatan secara penuh.



Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

3.2 LEMBAGA DEMOKRASI

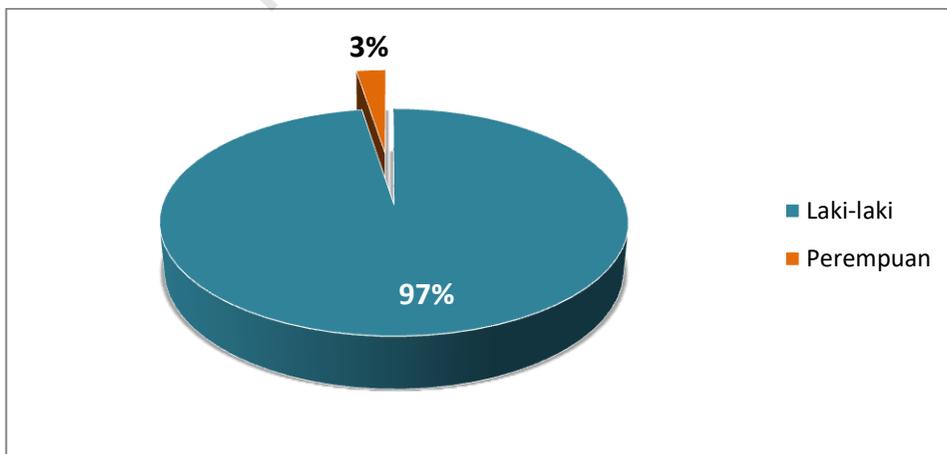
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk (1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, (2) berekspresi atau berpendapat, (3) menjadi pejabat publik, (4) melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, (5) memberikan suara dalam pemilihan umum, (6) ada pemilihan umum yang jujur, (7) adanya sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan (8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena

itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl 1971: 3).

Berdasarkan konsepsi tersebut dibutuhkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai perantara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga formal yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Masyarakat akan menyampaikan aspirasi mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama. Kelompok atau lembaga tersebutlah yang akan berperan dalam menjembatani kepentingan warga tersebut.

3.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

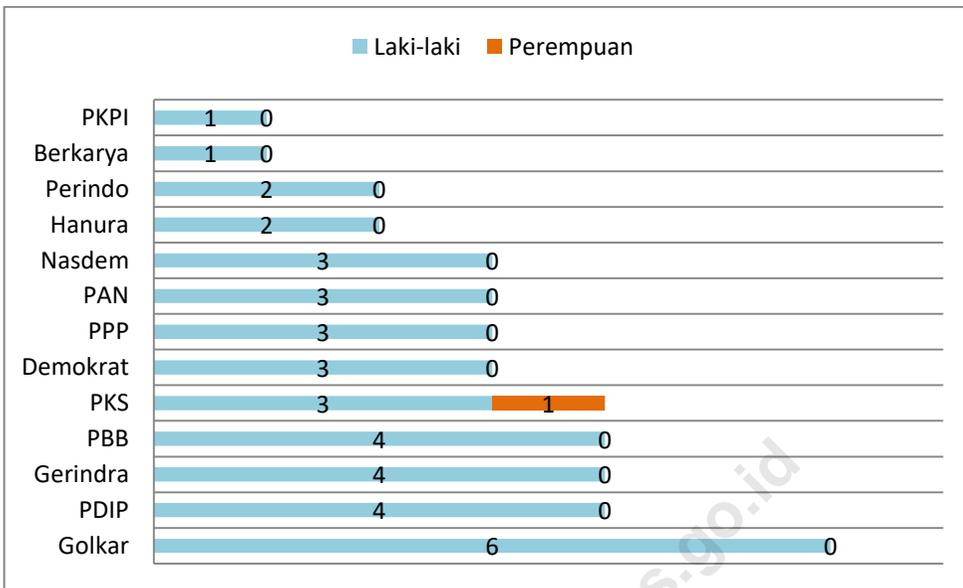
DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021 memiliki 40 anggota, yang terdiri dari 39 laki-laki dan 1 perempuan. Gambar 2 menunjukkan persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 menurut jenis kelamin.



Gambar 2. Persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut jenis kelamin Tahun 2021

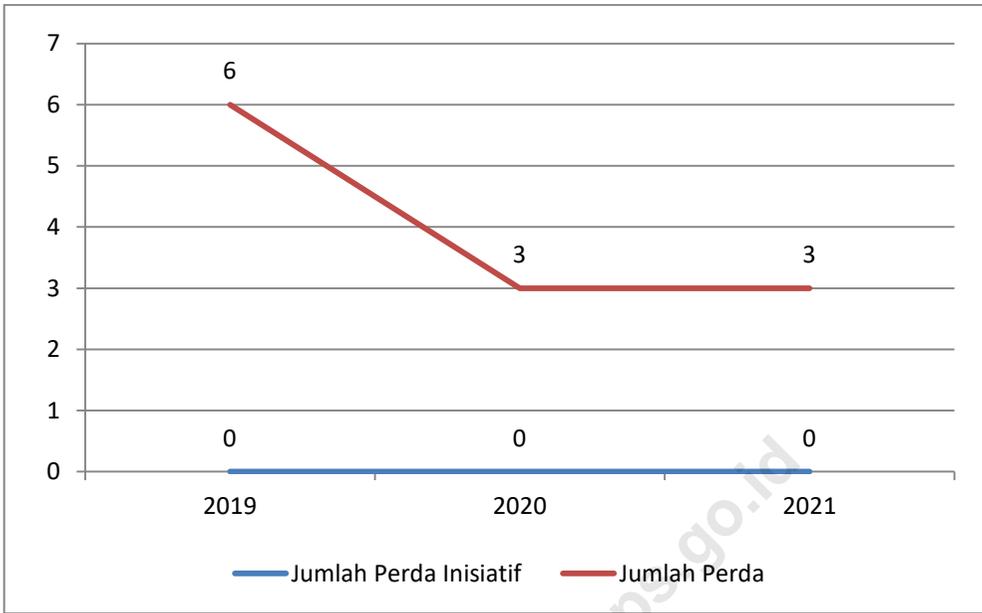
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa persentase anggota perempuan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu hanya sebesar 3 persen, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Indragiri Hulu masih di bawah persentase yang diharapkan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Maka, untuk pemilu selanjutnya partai politik harus memerhatikan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dapat memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Anggota DPRD Kabupaten Indragiri hulu merupakan wakil dari tiga belas partai politik. Partai Golkar menjadi partai dengan perwakilan terbanyak, yaitu sebanyak enam orang, kemudian diikuti oleh PDIP, Gerindra, PKS, dan PBB dengan masing-masing diwakili oleh empat orang. Sedangkan partai Berkarya dan PKPI menjadi partai dengan perwakilan paling sedikit, yaitu sebanyak satu orang. Gambar 3 menunjukkan jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dan jenis kelamin tahun 2021.



Gambar 3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Salah satu peran DPRD adalah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Perda yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Gambar 4, menunjukkan Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Jumlah Perda yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 6 Perda. Kemudian mengalami penurunan menjadi 3 Perda pada tahun 2020 dan jumlah Perda yang sama untuk tahun 2021.



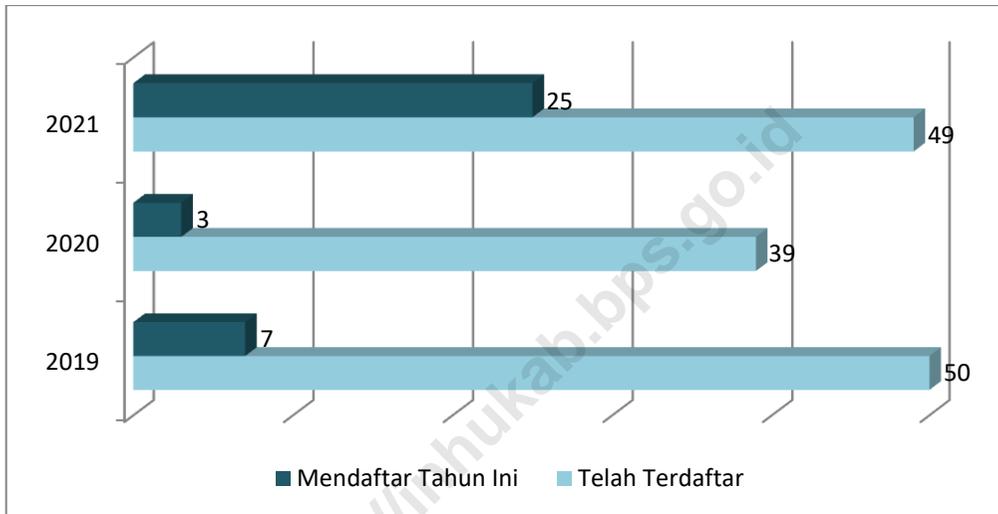
Gambar 4. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021

Dari sejumlah Perda yang dihasilkan, di dalamnya termasuk Perda Inisiatif, yaitu Perda yang dirancang berdasarkan inisiatif DPRD. Jumlah Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terus mengalami penurunan dan sejak tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hulu tidak lagi menghasilkan Perda Inisiatif. Perda Inisiatif terakhir kali dihasilkan pada tahun 2017.

3.2.2 Organisasi Masyarakat/LSM

Berdasarkan data Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Indragiri Hulu yang di tunjukkan pada Gambar 5, memperlihatkan bahwa jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan tren yang fluktuatif (naik turun). Tahun 2019 menunjukkan jumlah organisasi masyarakat/LSM sebanyak 50 organisasi, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 39 organisasi dan kembali meningkat menjadi 49 organisasi pada tahun 2021.

Peningkat jumlah organisasi masyarakat/LSM pada tahun 2021, berbanding lurus dengan kenaikan jumlah organisasi masyarakat/LSM dengan status baru mendaftar yang terus mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk membentuk organisasi masyarakat/LSM meningkat pada tahun 2021.



Gambar 5. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021

Diperlukan sosialisasi oleh Bakesbangpol untuk meningkatkan aktifitas atau kegiatan organisasi masyarakat/LSM sehingga organisasi masyarakat tersebut dapat berjalan secara terus menerus sehingga masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, diperlukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat/LSM agar kegiatan organisasi bisa optimal, sehingga dapat lebih bermanfaat baik untuk anggota organisasi maupun untuk masyarakat sekitar.

4

KEAMANAN



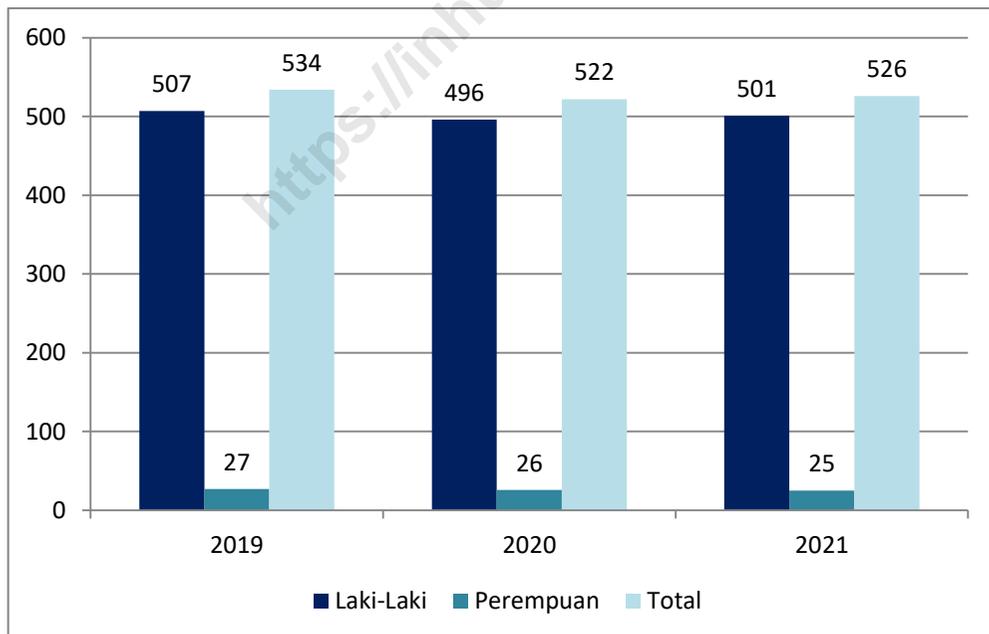
POLICE DEPARTMENT

BAB IV KEAMANAN

4.1 SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN WILAYAH

Ketersediaan fasilitas dan jumlah personel keamanan suatu wilayah akan memengaruhi kondisi keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, diantaranya adalah Polres, Polsek, dan pos polisi. Jumlah Polres, Polsek, dan pos polisi di Kabupaten Indragiri hulu tidak mengalami perubahan dari tahun 2019-2021 yaitu satu Polres, sepuluh Polsek, dan tujuh pos polisi.

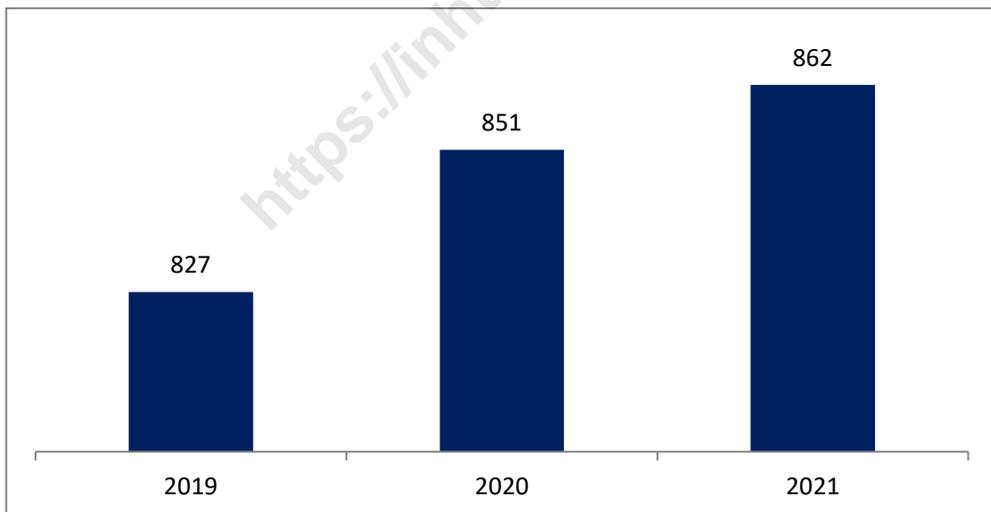
Selain fasilitas keamanan, jumlah personel yang dimiliki suatu wilayah juga berperan penting dalam menjaga kondisi keamanan di wilayah tersebut. Gambar 6 menunjukkan jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019-2021.



Gambar 6. Jumlah Personel Polisi Kabupaten Indragiri Hulu menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa jumlah personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2019-2021 selalu di dominasi oleh laki-laki.

Tugas polisi sebagai pelayan masyarakat membuat rasio penduduk per polisi menjadi salah satu indikator yang penting untuk diketahui terutama dalam pengambilan keputusan penempatan personel polisi di suatu wilayah. Jika proporsinya tidak ideal, maka tugas polisi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak optimal karena tidak semua masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik. Gambar 7 menunjukkan rasio penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018-2020.



Gambar 7. Rasio Penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Tahun 2019-2021

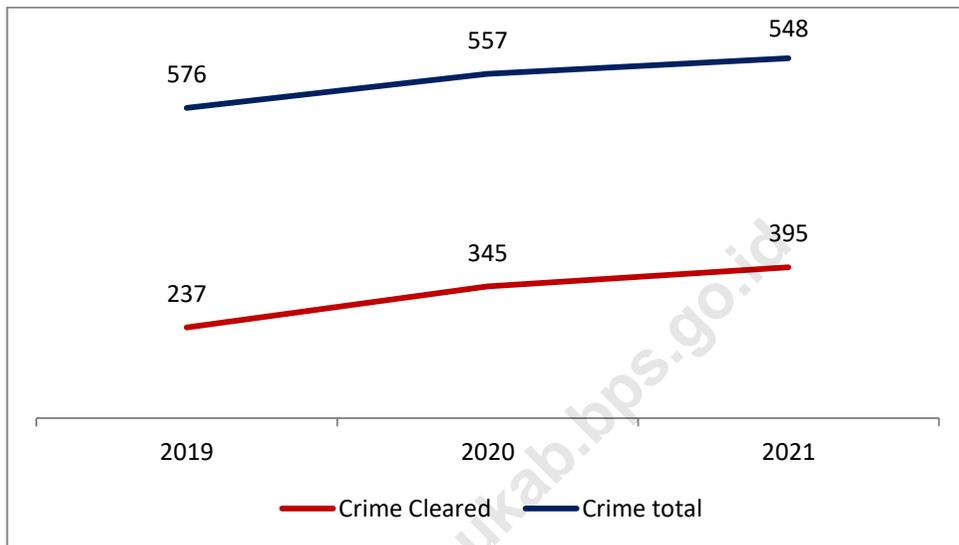
Berdasarkan Gambar 7, pada tahun 2021 satu orang personel polisi harus melayani 862 penduduk. Rasio ini naik dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa beban petugas personel polisi untuk dapat melayani masyarakat bertambah. Menurut PBB, rasio ideal polisi terhadap penduduk adalah 1:400, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Hulu belum ideal. Oleh karena itu perlu adanya tambahan personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu sekitar dua kali lipat dari jumlah polisi saat ini.

4.2 INDIKATOR UTAMA KEJAHATAN

Data dan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin masyarakat merasa tidak aman. Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian (*crime total*) Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 sebanyak 548 kasus, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 557 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 576 kasus. Jika jumlah kejahatan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan di suatu wilayah, maka dari hasil pencatatan kepolisian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu meningkat dari tahun 2019-2021.

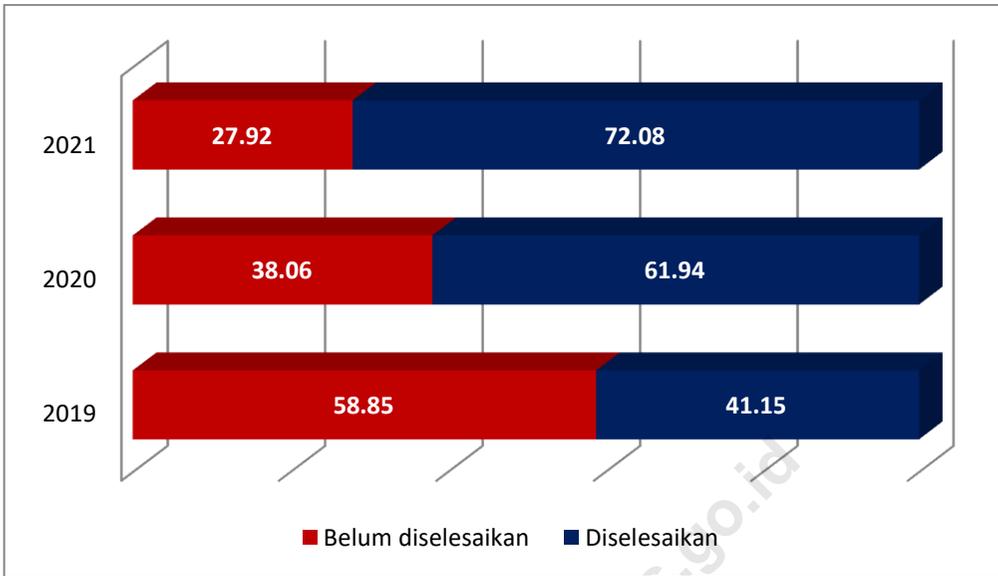
Selain jumlah kejahatan, terdapat juga jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*). Dari 576 kasus yang dilaporkan tahun 2019, sebanyak 237 kasus dapat diselesaikan. Kemudian di tahun 2020, dari 557 kasus yang dilaporkan sebanyak 345 kasus berhasil diselesaikan. Kemudian dari 548 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021, sebanyak 395 kasus berhasil diselesaikan. Gambar 8 menunjukkan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan tahun 2019-2021. *Crime rate* adalah

angka kejahatan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021, *crime rate* sebesar 121. Artinya, sebanyak 121 orang penduduk berisiko terkena kejahatan (per 100.000 penduduk).



Gambar 8. Jumlah kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) dan Kejahatan Diselesaikan (*Crime Cleared*) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021

Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian pada tahun 2019, sekitar 41.15 persen perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (*clearance rate*). Kemudian meningkat menjadi 61.94 persen di tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 72.08 persen di tahun 2021. Gambar 9 menunjukkan persentase perkara tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019-2021.



Gambar 9. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021

4.3 TINDAK KEJAHATAN MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Berdasarkan data Kepolisian Kabupaten Indragiri Hulu, peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum sangat beragam, baik jenis maupun kuantitasnya. Banyaknya kasus kejahatan baik yang dilaporkan maupun yang diselesaikan di tahun 2021 berdasarkan kelompok kejahatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Jika dilihat dari jenis kejahatannya, pada tahun 2021 tiga jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dan penganiayaan ringan. Pencurian dengan pemberatan juga menempati peringkat pertama untuk tahun 2020 dengan 99 kasus. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 85 kasus. Dari 85 kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan, hanya 26 kasus yang berhasil diselesaikan atau sekitar 30.59 persen. Selanjutnya, kejahatan pencurian

menempati peringkat kedua terbanyak untuk tahun 2021 dengan 81 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan 69 kasus. Untuk kejahatan penganiayaan ringan menempati peringkat ketiga terbanyak dengan 68 kasus. Kasus ini juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan 62 kasus.

Hal yang harus diwaspadai selain dari jumlah kejahatan yang tinggi adalah kejahatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Penganiayaan ringan, kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, pencurian, penipuan, dan korupsi menjadi jenis kejahatan yang tergolong pada kelompok ini. Pada tahun 2021 kejahatan pencabulan melonjak dengan sangat tajam dari nol kasus pada tahun 2020 menjadi 13 kasus di tahun 2021 dengan 10 kasus berhasil diselesaikan oleh kepolisian. Selain jumlah kejahatan yang mengalami kenaikan, juga terdapat kejahatan yang mengalami penurunan di tahun 2021. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, perkosaan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pembakaran dengan sengaja, dan ketertiban umum. Pencurian kendaraan bermotor mengalami penurunan tertinggi, dari 85 kasus di tahun 2020 menjadi 57 kasus di tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu semakin meningkat dalam kurun waktu 2019-2021, meskipun demikian tetap diharapkan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa bekerja sama demi menekan jumlah kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga tercipta Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih aman. Pemerintah diharapkan dapat lebih aktif dalam menghimpun informasi dari masyarakat terkait tindak kejahatan dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan tindak kejahatan sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan dan kebijakan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih baik.

4.4 KORBAN KEJAHATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Selain jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Polres Kabupaten Indragiri Hulu juga mencatat jumlah korban kejahatan menurut kelompok dan jenis kelamin. Informasi ini berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Tabel jumlah korban kejahatan menurut kelompok dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 2.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2021 jenis kejahatan dengan korban terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan dengan jumlah korban 85 orang yang terdiri dari 58 laki-laki dan 27 perempuan. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 99 korban dengan 76 laki-laki dan 23 perempuan. Jenis kejahatan selanjutnya yang memiliki korban terbanyak kedua adalah pencurian dengan jumlah korban sebanyak 81 orang terdiri dari 64 laki-laki dan 17 perempuan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 69 korban dengan 64 laki-laki dan 5 perempuan. Jenis kejahatan dengan korban ketiga terbanyak adalah penganiayaan ringan dengan jumlah korban 68 orang terdiri dari 64 laki-laki dan 4 perempuan. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan 62 korban terdiri dari 48 laki-laki dan 14 perempuan.

Selain jenis kejahatan dengan jumlah korban terbanyak, jenis kejahatan yang perlu untuk diperhatikan adalah kejahatan dengan jumlah korban perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini mengingat kejahatan terhadap perempuan menjadi perhatian berbagai pihak baik

pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun swasta melalui berbagai LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu jenis kejahatan dengan korban perempuan terbanyak sebanyak 24 korban yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Perlu diberikan perhatian agar jumlah korban dapat ditekan untuk dimasa yang akan datang.

5

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilu legislatif tahun 2021 sebanyak 40 orang yang berasal dari 13 partai politik. Dari jumlah tersebut, hanya 3 persen anggota yang berjenis kelamin perempuan.
2. Jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan oleh anggota DPRD tahun 2021 berjumlah 3 Perda dengan tidak ada Perda Inisiatif yang dihasilkan.
3. Jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021 sebanyak 49 organisasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 39 organisasi.
4. Fasilitas keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021 terdiri dari 1 Polres, 10 Polsek, dan 5 pos polisi.
5. Rasio penduduk per polisi tahun 2021 sebesar 862, artinya satu orang personil polisi melayani 862 penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Angka jumlah kejahatan (*crime total*) tahun 2021 adalah sebanyak 548 kasus, dan sekitar 72.08 persen dapat diselesaikan (*clearance rate*).
7. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) tahun 2020 sebesar 121, artinya sebanyak 121 orang penduduk berisiko terkena kejahatan.
8. Selama tahun 2021 yang sering terjadi dan dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian, dan penganiayaan ringan.

Lampiran 1

JUMLAH KEJADIAN KEJAHATAN (LAPOR DAN SELESAI) TAHUN 2021

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2021	
		LAPOR	SELESAI
1	2	3	4
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA			
	1. PEMBUHUNAN	-	1
KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN			
	2. PENGANIAYAAN RINGAN	68	66
	3. PENGANIAYAAN BERAT	0	0
	4. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	24	21
KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN			
	5. PERKOSAAN	3	1
	6. PENCABULAN	13	10
KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG			
	7. PENCULIKAN	-	-
	8. MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	-	-
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN			
	9. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	3	4
	10. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API (SENPI)	-	-
	11. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (SAJAM)	-	-
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG			
	12. PENCURIAN	81	57
	13. PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	85	26
	14. PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	57	20
	15. PENGUSAKAN/PENGHANCURAN BARANG	9	6
	16. PEMBAKARAN DENGAN SENGAJA	-	-
	17. PENADAHAN	-	5
KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN KORUPSI			
	18. NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	-	-
KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN KORUPSI			
	19. PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	32	15
	20. PENGGELAPAN	52	33
	21. KORUPSI	2	-
KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM			
	22. TERHADAP KETERTIBAN UMUM	0	0

Lampiran 2

JUMLAH KORBAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2021	
		LAPOR	SELESAI
1	2	3	4
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA			
	1. PEMBUHUNAN	1	-
KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN			
	2. PENGANIAYAAN RINGAN	64	4
	3. PENGANIAYAAN BERAT	-	-
	4. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	-	24
KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN			
	5. PERKOSAAN	-	3
	6. PENCABULAN	-	13
KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG			
	7. PENCULIKAN	-	-
	8. MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	-	-
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN			
	9. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	3	-
	10. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API (SENPI)	-	-
	11. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (SAJAM)	-	-
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG			
	12. PENCURIAN	64	17
	13. PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	58	27
	14. PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	38	19
	15. PENGRUSAKAN/PENGHANCURAN BARANG	9	-
	16. PEMBAKARAN DENGAN SENGAJA	-	-
	17. PENADAHAN	-	-
KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN KORUPSI			
	18. NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	-	-
KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN KORUPSI			
	19. PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	20	12
	20. PENGGELAPAN	38	18
	21. KORUPSI	-	-
KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM			
	22. TERHADAP KETERTIBAN UMUM	-	-

<https://inhukab.bps.go.id>

DATA MENCERDASKAN BANGSA

<https://inhukab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

JALAN BATU CANAI KELURAHAN PEMATANG REBA INDRAGIRI HULU
TELP. (0769) 34125
HTTP://INHUKAB.BPS.GO.ID EMAIL : BPS1402@BPS.GO.ID